

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI CHINA, PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI OBOR, DAN KEPENTINGAN CHINA DI KAWASAN TIMUR TENGAH

A. Orientasi dan sejarah politik luar negeri China.

China kini menjadi sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan besar di dunia. Keadaan inilah yang kemudian mendorong negara ini untuk terus mengembangkan pembangunan ekonominya. Dari praktik isolasionis kini China berubah menjadi negara yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Berbagai hubungan kerjasama dilakukan dengan tetap melakukan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan untuk mewujudkan politik luar negerinya dengan tetap menerapkan sebagian ajaran sejarah negara tersebut di masa lampau. (UMY repository)

Pada beberapa dekade terakhir, China telah muncul sebagai kekuatan baru dunia kontemporer dan menyaingi Amerika Serikat sebagai hegemon dunia sejak era perang dunia ke-2. Keadaan ini tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah China untuk mentransformasi sistem politik dan ekonomi negaranya yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan signifikan kaitannya dengan mengubah stigma negara tersisolasi menjadinegara yang dengan kekuatan regional dan kekuatan besar potensial yang mampu menimbulkan banyak pengaruh tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga semakin luas di mata dunia.

Pertumbuhan China sebagai kekuatan dunia baru, tidak dapat dipisahkan dari adanya beberapa revolusi dan perubahan yang dilakukan para pemimpin China dari masa ke masa. Dimana perubahan tersebut dimulai dari kepemimpinan era Mao pada tahun 1949-1976. Mao Zedong yang pernah belajar ajaran Marxisme-Leninisme telah membawa negara tersebut menjadi negara yang bersifat isolasionis yang mengarahkan China untuk membangun kekuatan melalui hubungan dengan negara-negara sosialis lain kaitannya untuk menandingi Amerika Serikat kala itu.

Revolusi selanjutnya dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1979-1989, dalam masa kepemimpinannya Den Xiaoping China mulai menerapkan kebijakan luar negerinya yang berfokus pada ekonomi domestik melalui kebijakan "*Open Door Policy*". Jika sebelumnya China selalu menjadi kekuatan triangular dalam hubungan AS dengan Soviet, kini China mulai melancarkan politik luar negerinya yang independen. Berbagai revolusi dilakukan pada masa ini,

baik perubahan yang sifatnya domestik maupun perubahan dengan melibatkan sistem internasional. (UMY repository, p. 20)

Pada sisi domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi fokus utama politik luar negeri China kala ini. Pada sisi internasional, China mulai menjalin hubungan baik dengan dunia internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjamin terciptanya lingkungan yang inducif bagi pertumbuhan ekonomi China. Transformasi China dari yang awalnya sempat menerapkan praktek isolasionis beralih memfokuskan politik luar negerinya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi telah berhasil melahirkan China yang baru.

China mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan keberadaanya diakui sebagai salah satu “great power” dalam tatanan dunia internasional. Kepemimpinan China selanjutnya berada di tangan Jiang Zemin (1989-2002). Pada masa kepemimpinan Zemin, politik luar negeri China tidak mengalami perubahan yang signifikan. China tetap menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama kebijakan mereka. Akan tetapi negara tersebut tetap aktif dalam berbagai institusi internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa ini telah terjadi pergeseran penafsiran sosialisme menjadi sesuatu yang lebih liberal dengan mengarahkan politik luar negerinya menciptakan tatanan internasional yang multipolar dimana perekonomian China lebih bersifat liberal dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai porosnya.

Selanjutnya setelah kepemimpinan Jiang Zemin berakhir, dilanjutkan oleh era kepemimpinan Hu Jintao (tahun 2002-sekarang). Pada era ini, China sudah menjadi *major power*, terutama dalam hal perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat. China semakin aktif dalam mempromosikan globalisasi ekonomi dan multipolarisme. Pada era ini, arah politik luar negeri China pun semakin jelas: China ingin menciptakan situasi internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonominya dengan cara menghindari konfrontasi yang ada. Partisipasi aktif China dalam institusi internasional pun ditandai dengan partisipasi aktifnya dalam World Trade Organization (WTO) pada 2001. (UMY repository, p. 21)

Tidak hanya aktif secara global, China pun mulai aktif dan membangun berbagai kerjasama kawasan, salah satunya adalah melalui kerjasama ekonomi China dan Rusia dengan negara-negara Asia Tengah melalui SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). Untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang muncul pemerintah Cina kemudian menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih terbuka, serta mempromosikan hubungan keamanan yang stabil dengan negara tetangga.

Cina kemudian mengembangkan hubungan kerjasama dengan Asia Tengah melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO).

SCO merupakan organisasi regional yang dibentuk berdasarkan mekanisme *Shanghai Five* pada tahun 2001. Organisasi yang beranggotakan enam negara termasuk Cina sebagai salah satu penggagas terbentuknya SCO memiliki tujuan utama untuk memperkuat rasa saling percaya antar anggota, persahabatan dan kehidupan bertetangga yang baik antar negara anggota, mengembangkan kerjasama yang efektif dalam politik, keamanan, ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan, sosial, energi dan bidang lainnya. Selain itu tujuan SCO juga untuk menjaga perdamaian keamanan dan stabilitas kawasan, serta mendorong terciptanya tata ekonomi dan politik internasional baru yang rasional berlandaskan pada prinsip demokrasi dan keadilan.

Seiring dengan transformasi politik yang terjadi, China telah berubah menjadi Negara yang lebih terbuka terhadap pergaulan Internasional. Hal ini dilakukan China untuk mengamankan pembangunan ekonomi negara dan integritas teritorial mereka.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan kegiatan politik luar negerinya China sangat mengedepankan penggunaan "*soft power*" dan menekankan cara-cara damai atau lebih kepada penggunaan kerjasama daripada perang dan cara-cara kasar lainnya. Hal ini tidak lepas dari masih dipegangnya prinsip yang diyakini oleh pemimpin mereka yaitu Mao Zedong yang menganut doktrin Maois dari 5 prinsip Hidup berdampingan secara damai (*Five Principles Of Peaceful Coexistence*).

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan China untuk menyerukan dan mempromosikan gerakan saling menghormati integritas teritorial masing-masing dan kedaulatan negara, kesetaraan setiap negara dengan tidak saling melakukan agresi, tidak saling campur tangan dalam urusan internal masing-masing negara.

Selain berpedoman terhadap "*Five Principles Of Peaceful Coexistence*" kebijakan politik luar negeri China juga dipandu oleh 4 prinsip (sibu) yakni tidak adanya hegemoni, tidak ada politik kekuasaan, tidak ada aliansi militer dan tidak ada perlombaan senjata. Selaras dengan Hal ini, Pemimpin China Hu Jin Tao menekankan bahwa kepentingan China berada pada kerangka damai dan ingin meningkatkan pengaruhnya dalam sistem internasional dan keinginan untuk meningkatkan kerukunan internasional yang lebih besar lagi. Hal ini dinyatakan Jin Tao pada pidatonya di depan Kongres Nasional ke-17 Partai Komunis China di Beijing pada Oktober 2007.

Prinsip Soft Power yang menjadi pedoman utama Politik Luar Negeri China secara penuh tidak hanya dilakukan pada masa kepemimpinan Hu Jintao akan tetapi pemimpin mereka yakni

Xin Jiping juga menerapkan prinsip yang sama. Dimana keduanya melakukan dua konsep kebijakan luar negeri yakni *“Peaceful Rise”* (Heping Jueq) dan *Peaceful Of World* (Hexie Shijie). Dimana hal ini dapat dilihat dari serangkaian perjalanan yang dilakukanke berbagai belahan dunia termasuk negara-negara berkembang dalam rangka mempromosikan kerjasama dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan melakukan dialog-dialog penting. (UMY repository, p. 24)

Berakhirnya perang dingin tidak menghentikan Amerika Serikat dengan Rusia atas ketakutannya satu sama lain. Namun, apapun yang mengancam China secara fundamental tidak sama dengan konflik ideology antara NATO dan Pakta Warsawa. Konflik yang terjadi tidak hanya karena ideologi, keadaan kondisi domestic dan pandangannya terhadap dunia luar yang mereka punya, namun juga persaingan keduanya tentang perannya di tatanan dunia ini.

Soviet yang berdasarkan pada ideology dunia yang revolusioner yang dimotori oleh hasil dari persaingan kelas diantara kaum proletar. Komunis yang menang diakhir cerita karena Lenin dan pengikutnya berargumen bahwa Negara Soviet mempunyai system ekonomi yang paling baik. Namun berbeda dengan dasar ideology dari sistem yang dimiliki China yang tidak mempunyai ambisi seperti yang dimiliki oleh Rusia. Tujuan ideology Mao Zedong adalah terpusat pada wilayah revolusi lokal, tidak ada revolusi sosial secara internasional.

Saat ini para pemimpin China meninggalkan ekonomi Marxist dan mencoba untuk memodernisasi ekonomi dengan kapitalisme dan pasar bebas. Menurut China tidak ada tujuan untuk melawan Negara Barat namun dengan tuuanmenjadi rejim ekspansionis, China menggunakan model *Asian Authoritarianism* yang secara ideologi menentang liberalism barat dan mempunyai cara untuk mengorganisasi yang menarik antara ekonomi dan politik namun tidak secara fundamental melawan dan menonjolkan eksklusifitas ideologi seperti yang dipunyai Marxisme atau Leninisme. (UMY repository, p. 25)

Saat ini, China telah berhasil melakukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan pengaruhnya di dunia luar, hal inilah yang kemudian mendorong China untuk terus melakukan transformasi di dalam negaranya terkait dengan usahanya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi negara tersebut yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Dimana transformasi tersebut salah satunya dilakukan melalui politik luar negerinya.

Dalam praktiknya selama beberapa tahun belakangan, Tujuan politik luar negeri China berfokus pada kestabilan keadaan domestik, keutuhan wilayah negara, meningkatkan keamanan

nasional, hingga menjalin kerjasama wilayah. Dimana faktor inilah yang dianggap pemimpin China dapat mendukung pembangunan negara mereka. Dibawah ini uraian lebih detail mengenai tujuan politik luar negeri China tersebut:

1. Keadaan Domestik.

“Being strong inside of the country means independent and influential in International area”.

Prinsip inilah yang dipegang Pemerintah China dalam menjaga kestabilan domestic mereka kaitanya untu menjadi negara yang berpengaruh pada pergaulan internasional. Runtuhnya kekuasaan Ming, salah satu dinasti China telah mengakibatkan melemahnya kedaulatan pemerintah pusat dan meningkatkan pengaruh aktor luar dalam politik dalam negeri mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut China beranggapan bahwa stabilitas keamanan domestic dan menjamin keamanan batas negara dapat meningkatkan kepercayaan diri China di pergaulan internasional. Prinsip kestabilan domestic ini muncul menjadi salah satu pedoman bagi China kaitannya dalam menjalankan politik luar negerinya tidak terlepas dari pengalaman pahit yang dialami China mengenai ketidaksetaraan dan perbedaan masyarakat China.

Pertumbuhan ekonomi China yang cenderung cepat pada beberapa dekade terakhir juga telah berdampak pada perubahan karakteristik orang China itu sendiri. Transformasi negara China dari negara yang berbasis masyarakat petani menjadi masyarakat ekonomi pasar pada tahun 1980-1990 banyak diantara mereka yang berasal dari kawasan pedesaan yang berprofesi sebagai petani beralih dan datang ke kota untuk bekerja pada sektor industri.

Inilah yang kemudian menjadi faktor terciptanya gap yang cukup jauh antara perkembangan ekonomi pedesaan dan perkembangan ekonomi perkotaan China.

Tidak terbatas pada masalah perbedaan karakteristik dan gap yang terjadi diantara masyarakat China, masalah domestic China juga muncul dalam ranah politik mereka yakni keberlanjutan peran CCP (*Chinese Communist Party*). Pembangunan ekonomi besar-besaran China dalam hal teknologi, transformasi sosial, dan peningkatan kondisi ekonomi China telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap eksistensi CCP.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut telah membuka mindset masyarakat terhadap CCP, utamanya terhadap ajaran-ajaran komunis. Dimana mereka menuntut negara untuk menerapkan ajaran liberal yakni meningkatkan upaya privatisasi dan menurunkan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi mereka. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh pendukung

setia partai komunis yang lebih mengedepankan persamaan derajat bagi masyarakat dan lebih menerapkan ajaran sosialis daripada menerapkan ajaran kapitalis.

2. Keutuhan Wilayah China.

Menjaga keutuhan wilayah China menjadi salah satu fokus politik luar negeri China belakangan ini. Hal ini terasa sangat wajar mengingat China mengalami berbagai masalah internal kaitanya dengan masalah keutuhan wilayahnya. Tercatat berbagai upaya separatisme dilakukan oleh masyarakat China. Beberapa diantaranya adalah kasus separatisme wilayah Tibet yang sudah dimulai sejak tahun 1911. Tepatnya saat China berubah bentuk pemerintahan menjadi republik, Tibet diberikan statut independen secara de facto pada masa itu.

Fokus politik luar negeri China belakangan ini mengacu pada peningkatan kerjasama regional. Untuk menerapkan prinsip suka perdamaian dan mencapai kepentingan nasionalnya tentu China tetap membutuhkan peranan negara lain untuk mewujudkannya. Baik kepentingan dari segi politik, ekonomi, keamanan, maupun kepentingan lainnya. Selain daripada itu, China juga membutuhkan bantuan negara lain untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan domestiknya.

Akan tetapi Republik Tiongkok tetap tidak mengakui Tibet sebagai wilayah berdaulat. Hingga akhirnya, pada tahun 1950 Tiongkok mengambil alih kawasan Tibet melalui invasi militer yang dilakukan oleh PLA (*People Liberation Army*). Berbagai upaya dilakukan Tibet untuk tetap memisahkan diri dari Tiongkok salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada PBB, akan tetapi permintaan bantuan itu tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Tibet harus menyerah dengan menyetujui “Tujuh Kesepakatan” dengan Tiongkok yang didalamnya memuat tentang kesepakatan bahwasannya Tibet Merupakan bagian dari Tiongkok.

Selain masalah separatisme Tibet tersebut, China juga mengalami masalah yang hamper sama. Yakni gerakan separatisme Xinjiang yang merupakan salah satu kawasan strategis di negara tersebut. Xinjiang sendiri merupakan daerah yang dihuni mayoritas muslim dan bermadzhab Hanafi. Daerah otonom yang memiliki nama lengkap Uyghur Xinjiang ini merupakan daerah China yang memiliki perbatasan langsung dengan Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, Afganistan, Pakistan.

Daerah Xinjiang terletak tepat di jantung Asia. Daerah ini sebagian besar terdiri dari pegunungan, gurun, dan stepa, juga merupakan sebuah wilayah masyarakat nomadik, wilayah pertanian, dan beberapa kota oasis yang penting. Gurun terbesar di Xinjiang antara lain: Karakum,

Kyzylkum, dan Taklamakan. Masyarakat adat dari XUAR adalah orang-orang Turki yang mayoritas Muslim. Mereka termasuk Uighur, Kazaks, Uzbek, Kyrgyz, Tajik, Tatar dan kelompok lain secara resmi diklasifikasikan sebagai “minoritas nasional” oleh RRC, termasuk Hui, etnis Cina yang beragama Islam.

Xinjiang adalah wilayah administrasi terbesar di China, tetapi karena geografisnya yang berupa pegunungan dan gurun, sehingga relatif jarang penduduknya. Berdasarkan sensus tahun 2010, Uighur, Muslim Sunni berbahasa Turki, menyumbang 44% dari populasi Xinjiang dan Han Cina 41%. Di utara Xinjiang, yang meliputi Urumqi, Cina Han menjadi penduduk mayoritas, sedangkan di selatan, di mana Kashgar merupakan pusat kota utama, Uighur mendominasi. Daerah ini juga secara resmi dibagi menjadi sejumlah daerah etnis (misalnya Daerah Otonomi Hui Changji, Daerah Otonomi Yili Kazakh, dll). Ada sekitar 47 kelompok etnis yang berbeda di Xinjiang.

Dengan keadaan banyaknya suku yang mendiami di daerah tersebut lah yang menjadi faktor timbulnya beberapa konflik yang ada di Xinjiang. Konflik antar suku Han dan warga sipil Uigur dimana kerusuhan tersebut berdampak pada terjadinya serangan serangan terror dan fasilitas umum dimana kondlik tersebut juga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Keinginan daerah otonom Xinjiang untuk melepaskan diri dari bagian negara China tidak terlepas dari Perbedaan pandangan antara pemerintah China dan penduduk Muslim China.

Muslim Asia Tengah yang bergerak untuk mengambil kekuasaan di negara Asia Tengah menjadi pemicu kebangkitan gerakan Muslim China di Xinjiang untuk ikut serta dalam perjuangan melepaskan diri dari China. Pemerintahan di Asia Tengah juga mengalami perbedaan persepsi namun pemerintah disana berusaha untuk memerangi fundamentalisme agama dan berusaha untuk memenangkan pertempuran dengan meminta bantuan dari komunitas dunia dan negara-negara sekuler seperti China, AS dan juga Uni Eropa.

Kaum Uyghur menganggap bahwa mereka harus mendapatkan kemerdekaannya seperti muslim di Asia Tengah. Jumlah suku Uyghur di Kazakhstan dan Kirgistan yang berjumlah 300.000 orang menciptakan kericuhan mobilisasi politik di kawasan China dan Asia Tengah. Terlihat jelas gerakan separatism di Xinjiang mendapat dukungan dan senjata militer dari Asia Tengah. Kekhawatiran China terhadap hal tersebut diutarakan setelah adanya bukti yang jelas saat sekitar 50 suku Uyghur dilatih di afganistan dan kemudian masuk ke China melalui beberapa negara di Asia Tengah yang berhasil menciptakan ketegangan dari semua negara di sekelilingnya.

Setelah intervensi AS di Afganistan dan kehadirannya di Asia Tengah membuat situasi semakin rumit. Di satu sisi China berusaha untuk memperkecil gerakan-gerakan militan Muslim dan dukungan kaum Uyghur di Afganistan dan Asia Tengah. Namun hal tersebut membuat kaum Muslim di China kecewa karena tidak mendukung Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi oleh AS. Bagi China, kehadiran AS di kawasan ini memberikan ancaman akibat dari perang Korea dan Vietnam dan lebih mengancam China jangka panjang dibanding ancaman gerakan separatisme itu sendiri. Sehingga China berusaha untuk meminimalisasi kehadiran AS.

Persepsi China tentang lingkungan secara fundamental mengalami perubahan setelah terjadinya peristiwa 9 September 2009 di New York, AS. Hal ini menyebabkan China harus menghadapi konfrontasi kekuatan AS di wilayah perbatasan bagian barat China. Berpijak pada ketegangan politik dan militer AS dengan China di kawasan Asia Timur, memunculkan usaha China melakukan segala cara untuk mengatasi situasi. Sejak saat itu, China memikirkan kembali kebijakan-kebijakannya dan meningkatkan posisinya dalam wacana militer dengan cara yang lebih strategis dengan mengkombinasikan kekuatan militer, ekonomi dan politik.

Menurut analisis AS, ekspansi militer China telah menuju pada pengimbangan militer regional atau *regional militer balance*. Modernisasi strategi nuklir, kemampuan akses darat dan laut dan jumlah senjata penyerangan yang dimiliki China juga dapat menimbulkan ancaman pada operasi militer AS di kawasan. Kehadiran AS di beberapa kawasan Asia Tengah semakin terlihat. AS berusaha melakukan *strategic partnership* dengan India, Singapura, dan Filipina. AS berusaha untuk menunjukkan kemampuannya di jantung Asia.

Sebagai usaha untuk memenuhi agenda strategi ini, doktrin strategi dan konsep operasional China telah mengalami transformasi secara sistematis dan mengalami reformasi pada kapabilitas dan permintaan untuk menjaga kredibilitas militer China. Alasan yang melatar belakangi pemikiran pemimpin-pemimpin China untuk menggaakan transformasi didalam tubuh militernya yaitu dengan operasi militer China. *People Liberation Army (PLA)* atau angkatan bersenjata China melakukan serangkaian tugas di Xinjiang dan Asia Tengah. Selain mengalami transformasi PLA juga menemukan tantangan yang ada di kawasan tersebut tetapi juga melihat pada pemikiran strateginya dengan melihat perubahan politik dunia yaitu *Revolution Military Affair (RMA)*.

3. Peningkatan Sektor Keamanan.

Tujuan politik luar negeri China selanjutnya adalah peningkatan sektor keamanan negara mereka. Membahas tentang keamanan suatu negara sangat erat kaitanya dengan keadaan militer negara tersebut. China sendiri mengalami sejarah yang panjang dengan angkatan militer mereka. Dimana sejarah tersebut mengalami perubahan seiring dengan perubahan pemimpin mereka. Dalam dunia militer China mengenal proses perkembangan militer mereka dengan adanya doktrin militer yang dilakukan oleh pemimpin mereka.

Doktrin yang cukup signifikan berpengaruh terhadap militer China adalah Mao dengan doktrin militer “ People Wars” dimana pada masa kepemimpinannya, melibatkan pertarungan angkatan militer yang sangat besar dan jumlah partisipan yang sangat besar pula yang pada masa itu bertujuan untuk melawan invasi yang dilakukan terkait adanya serangan dari pihak eksternal. Selanjutnya, perkembangan militer terjadi pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping merubah doktrin yang telah disebarkan dan diterapkan oleh Mao.

Deng lebih berfokus pada program modernisasi angkatan militer mereka dimana hal itu dituangkan dalam rencana yang mereka publikasikan dalam “*White Book*” pada tahun 2006. Dimana dalam agenda rencana tersebut modernisasi angkatan China akan dilakukan dalam tiga tahap sampai dengan tahun 2050 yakni, tahap pertama pada tahun 2006-2010 bertujuan untuk membangun basis militer yang kuat, tahap ke dua pada tahun 2010-2020 untuk pengembangan secara luas dan yang terakhir pada tahun 2020-2050 modernisasi yang berfokus pada kontruksi ilmu dan teknologi militer.

Selain memodernisasi angkatan militernya, untuk meningkatkan sektor keamanannya China juga mengambil kebijakan untuk meningkatkan anggaran militernya. Pada tahun 2012 terlihat adanya peningkatan sebesar 670,27 miliar yuan (965 triliun Rupiah) dimana anggaran militer tersebut hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer Serika Serikat. Dengan anggaran militer yang sedemikian besarnya, tidak mengherankan jika angkatan militer China memiliki kuantitas maupun kualitas yang mumpuni hal ini dapat dilihat dari data table berikut:

Angkatan	Jenis Peralatan
Angkatan Darat	31.300 senjata berbasis darat, 8.200 tank, 5.000 kendaraan pengangkut pasukan, 14.000 meriam, 1.700 senjata pendorong, 2.400 sistem peluncur roket, 16.000 mortir, 6.500 senjata kendali anti tank, dan 7.700 senjata anti-pesawat.
Angkatan Laut	760 unit kapal perang, 1.882 unit kapal pengangkut, 8 pelabuhan utama, 1 unit pengangkut pesawat, 21 unit kapal penghancur, 68 unit kapal selam, 42 fregat, 368 unit kapal patroli pantai, 39 unit kapal penyapu ranjau, dan 121 unit kapal amfibi.
Angkatan Udara	1.900 unit pesawat, 491 unit helikopter, dan 67 unit lapangan udara.

Sumber : Hendrajit dan Tim Global Future Institutue

4. Kerjasama Regional.

Fokus politik luar negeri di era Xi Jin Ping dalam visi OBOR nya yakni dengan menjalin kerjasama regional dengan negara-negara lainnya. Untuk menerapkan prinsip cinta akan perdamaian dan mencapai kepentingan nasionalnya tentu China tetap membutuhkan peranan dari negara-negara lain untuk dapat mewujudkannya baik itu dari segi kepentingan politik, ekonomi, keamanan, maupun kepentingan lainnya. Selain itu juga China membutuhkan bantuan dari negara lain untuk menyelesaikan permasalahan domestiknya.

Sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut China mengadakan kerjasama dengan berbagai negara di belahan dunia. Salah satunya adalah *Shanghai Cooperation*

Organization. Sebuah organisasi yang awalnya diprakarsai oleh China dan negara-negara Asia Tengah untuk sepakat secara bersama-sama menjaga keamanan wilayah perbatasan negara-negara anggota organisasi tersebut. Dimana hingga kini, organisasi tersebut berkembang baik dari segi jumlah partisipan maupun jumlah aspek kerjasama yang dikerjasamakan. (UMY repository, p. 36)

B. Perkembangan Politik luar negeri China terhadap kawasan Timur Tengah

1. Politik Luar Negeri China Sebelum OBOR

Meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara maju di Amerika dan Eropa selalu menduduki posisi penting dalam strategi luar negeri China. Sebaliknya, Timur Tengah terletak di urutan terpinggir. Ketika abad ke-21 mendekati dan ekonomi China menjadi tak terhindarkan terkait dengan seluruh dunia, ada beberapa alasan untuk menilai kembali makna strategis Timur Tengah bagi China seperti dari segi geopolitik, agama terutama islam, minyak mentah, keamanan politik dan ekonomi, kooperasi ekonomi, integrasi ekonomi, dan lain sebagainya.

Namun ketika kondisi Perang Dingin masih berkecamuk, dan Timur Tengah yang pada saat itu menjadi area utama persaingan antara Amerika Serikat dengan USSR, tidak ada kekuatan eksternal ketiga yang dapat menanggung bebannya. Itulah sebabnya kawasan Timur Tengah pada masa itu masih berada di pinggiran dalam kebijakan luar negeri China. Dan ketika era Perang Dingin telah menemui ajalnya, dan semakin menguatnya modernisasi China pada saat itu, China menjadi lebih tertarik untuk meningkatkan pengaruhnya untuk bersaing dengan dua negara adikuasa yang masih ada.

Akhir dari Perang Dingin membuat pendekatan China ke Timur Tengah menjadi tidak hanya tentang dorongan untuk meningkatkan status global, tetapi juga tentang mengkonsolidasikan ikatan ekonomi yang lebih dalam untuk memfasilitasi eskalasi ekspansi ekonomi China. Perluasan hubungan ekonomi China di Timur Tengah didukung oleh Beijing yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara di kawasan itu pada tahun 1992.

Selain itu, kemajuan proses perdamaian Arab-Israel pada saat ini memungkinkan kerja sama ekonomi untuk mendapatkan fokus sebagai prioritas untuk negara-negara itu. Kunci dari perkembangan lebih lanjut atas hadirnya China di kawasan Timur Tengah yakni pada saat China menjadi importir terbesar produk petrokimia pada tahun 1993. Sepanjang sisa periode ini hubungan antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah ditentukan oleh

kebutuhan akan produk petrokimia Teluk untuk mempercepat laju roda perekonomiannya. (The Diplomat, 2019)

Sejak awal periode "reformasi dan keterbukaan" China pada tahun 1978, China mengidentifikasi diri sebagai "pengamat" dan "penunggang bebas" di kawasan Timur Tengah, dengan kehadiran China semata-mata ditentukan dengan menuai manfaat ekonomi yang maksimal. Namun, penghindaran keras dari keterlibatan politik di wilayah ini mulai surut pada 2008, ketika China mengirim tiga kapal angkatan laut untuk berpartisipasi dalam operasi konterirasional multilateral di Teluk Aden. Kehadiran angkatan laut ini berlanjut selama perang sipil yang terjadi di Libya pada tahun 2011.

Perkembangan penting lebih lanjut dalam hal ini termasuk kontribusi China dalam mengirimkan 700 pasukan perdamaian untuk pasukan PBB di Sudan pada tahun 2012. Dalam hal ini China juga berkontribusi dalam pengiriman beberapa ratus teknisi dan tenaga medis untuk pasukan sementara PBB di Lebanon. Sementara keterlibatan keamanan terus meningkat pada periode ini, namun hal tersebut tidak mewakili dari apa yang digagaskan oleh Mao bahwa keterlibatan China di kawasan Timur Tengah murni oleh kepentingan keamanan nasionalnya, dan bukan karena keinginan ideologis untuk ikut campur didalam masalah besar di kawasan Timur Tengah ini. Ketika kebutuhan energi semakin tumbuh, China menjadikan energi sebagai pilar utama dalam keamanan nasional China.

2. Politik Luar Negeri China Terhadap Kawasan Timur Tengah Di Era OBOR

Politik luar negeri China dan hubungan ekonomi antara China dengan Timur Tengah mengalami perubahan yang signifikan terlebih dengan hadirnya *Belt Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jin Ping. Berkaca pada sentralitas Timur Tengah dengan desain dari *Belt Road Initiative*, kawasan Timur Tengah ditetapkan sebagai wilayah "tetangga" oleh China pada bulan November tahun 2013 dalam Sidang Paripurna Ketiga Komite Sentral ke-18 Partai Komunis China yang menandakan bahwa kawasan Timur Tengah saat ini berada didalam zona geostrategic prioritas utama China. (The Diplomat, 2019)

China mengurutkan negara-negara berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai oleh China, dan berdasarkan letak dimana negara itu berada dalam empat lingkaran geografis konsentris dari kerajaan di Timur Tengah. Ketika Timur Tengah dibayangkan kembali kedalam lingkaran konsentris terdekat di luar China, hal demikian menjadi fokus diplomasi China yang semakin proaktif, terutama dilakukan didalam kerangka kerja *Belt Road Initiative*. Mempriorotaskan

kawasan Timur Tengah dalam program *Belt Road Initiative* (BRI), yang merupakan fitur utama dalam diplomasi China kontemporer, menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar negara-negara Liga Arab dan Iran, dan juga menjadi mitra kunci bagi Israel.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi China yang tumbuh dengan sangat cepat, China menjadikan Timur Tengah sebagai sasaran investasi luar negerinya. China mulai memfokuskan strategi pengembangan investasi terhadap kawasan Timur Tengah karena pada dasarnya mayoritas minyak untuk mendorong laju pertumbuhan ekonominya berasal dari kawasan Timur Tengah. Politik luar negeri China terhadap kawasan Timur Tengah memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari politik luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan terhadap kawasan Timur Tengah. China dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap kawasan Timur Tengah tidak pernah mempermasalahkan politik dalam negeri di suatu negara dan sangat bertolak belakang dengan Amerika Serikat yang sangat dan selalu mengedepankan *Human Right* atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadikan demokratisasi sebagai sebuah prasyarat.

Bahkan China cukup berani dalam mengambil peranan melawan Amerika Serikat dan terjun dalam konflik yang terjadi di Suriah. China mempersiapkan Suriah dalam kebijakan *One Belt One Road Policy* (OBOR) dengan cara memveto resolusi *anti-Suriah* didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Saat ini China memposisikan negara-negara kawasan Timur Tengah dalam di dalam politik luar negerinya di posisi paling penting bagi China. Di kutip dari perkataan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bapak DR. Surwandono menjelaskan, "*China tidak mengembangkan politik asimilatif secara kaku. Tidak ada narasi "Chinasisasi"*". (MPHI, 2018)

China mendapatkan tantangan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Iran dari adanya sanksi terhadap Iran yang di keluarkan oleh presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sanksi tersebut dikeluarkan pada 3 Februari, merespon dari percobaan rudal balistik jarak menengah yang dilakukan oleh Iran. Berdasarkan keputusan Donald Trump, Departemen Keuangan Amerika Serikat akan menerapkan sanksi terhadap 25 perusahaan yang berkaitan dengan program rudal balistik Iran dan juga terhadap mereka yang memberikan dukungan terhadap Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran. Evaluasi positif China terhadap sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran, akan berdampak pada kebijakan luar negeri China dan sebagian besar

dikhawatirkan setelah JCPOA, posisi dominan ekonomi dan investasi China di Iran akan mendapat tantangan dari perusahaan-perusahaan Barat, seperti dari Perancis dan juga Amerika Serikat.

Namun beberapa petinggi China melihat sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran merupakan sebuah peluang yang berharga bagi China. Pasalnya mereka menilai bahwa apabila sanksi ini terus berkelanjutan dan akan ada banyak sanksi lainnya di masa yang akan datang, China akan menjadi satu-satunya mitra dagang yang dipercaya sepenuhnya bagi Iran.

Pada kenyataannya, sanksi yang diberikan Donald Trump terhadap Iran sebenarnya menantang dan dapat membahayakan kepentingan China terutama berdampak pada kelangsungan proyek “*One Belt One Road*” China (OBOR).

Tantangan langsung yang dihadapi oleh China yakni dari sektor ekonomi. Hubungan ekonomi antara China dengan Iran sebagian besar tidak tersentuh oleh serangkaian sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Sekarang satu dari tiga jaringan yang diberikan sanksi terhadap Iran oleh Amerika Serikat, termasuk juga perusahaan-perusahaan China dan orang-orang yang termasuk didalamnya. Aktor-aktor China merupakan target yang logis bagi Amerika Serikat untuk melemahkan percobaan rudal balistik Iran karena China dan Iran memiliki sejarah yang terdokumentasi tentang penyamaran pengiriman logistik ke Iran yang mendukung percobaan tersebut. Dan jelas pengiriman tersebut harus dibawah pengawasan Internasional saat ini dan didukung fakta bahwa Iran tidak dapat memperoleh peralatan untuk melakukan uji coba rudal balistik itu sendirian. (The Diplomat, 2017)

Tantangan politik juga menghiasi kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Timur Tengah yang dimana konflik ini tercipta dari kubu-kubu yang berlawanan yakni Sunni dan Syiah. Hal tersebut juga akan berdampak pada kelangsungan proyek *One Belt One Road*. Demi kelangsungan proyek besar ini, penting bagi China untuk tetap netral dan adil dengan semua negara di Timur Tengah, terlepas dari perbedaan ideologi dan perpecahan politik di wilayah tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tempat yang cocok bagi keberlangsungan dan kesuksesan proyek *One Belt One Road* (OBOR) yakni di zona-zona yang relative damai. Sanksi-sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah ini akan semakin mempercepat gejolak dan memperluas perbedaan di kawasan ini.

Perubahan yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah membuka peluang cukup luas bagi China untuk ikut berpartisipasi dalam urusan di kawasan Timur Tengah dengan sikap yang lebih progresif dan aktif. China mulai aktif untuk melancarkan kebijakan luar negerinya

terhadap kawasan Timur Tengah sejak 2010, dan menggantikan dominasi Amerika Serikat yang saat itu menjadi partner dagang terkuat di kawasan Timur Tengah. Pada waktu yang bersamaan, China juga mengalami “*pembunuhan karakter*” yang artinya bahwa China di pandang sebagai sebuah ancaman baru yang muncul setelah tergesernya posisi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Hal demikian membuat China harus berupaya keras untuk menunjukkan kepada negara-negara di kawasan bahwa China bukanlah ancaman bagi mereka, dan juga pertumbuhan ekonomi yang cepat secara obyektif menuntut China untuk menyusun strategi yang tepat di kawasan Timur Tengah. Tujuan dari strategi itupun jelas untuk memperkuat kerjasama politik dan ekonomi antara China Dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, meningkatkan lingkungan Internasional China, dan bersama dengan komunitas Internasional membangun dan mengembangkan stabilitas, perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah.

Pada awal tahun 2016 konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah kondisinya semakin memanas dan tak kunjung usai. Kondisi ini ditandai dengan memanasnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran setelah insiden pengeksekusian seorang ulama syiah Iran yang juga memicu kemarahan publik di kawasan Timur Tengah terutama Iran. Isu konflik panas lainnya yang tidak kunjung selesai diantaranya konflik antara Israel dengan Palestina, bahkan isu terorisme yang kini mewabah seperti Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Presiden Xi Jin Ping, mengambil langkah kebijakan terhadap Timur Tengah ditengah kisruhnya kondisi yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah dengan agenda kunjungannya ke Arab Saudi, Mesir, dan Iran pada tanggal 19 sampai dengan 23 Januari 2016. Presiden Xi Jin Ping pertama kali menjajakan kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah sejak memulai jabatan kepresidenannya pada tahun 2012. (detik.news, 2016)

Kunjungan Presiden Xi Jin Ping yang pertama kali ini merefleksikan arah kebijakan luar negeri China yang akan diterapkan oleh Presiden Xi Jin Ping walaupun dijelaskan secara samar mengenai penegasan kembali komitmen China untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan dan komperehensif di kawasan Timur Tengah. Presiden Xi Jin Ping memberikan pernyataan di depan para perwakilan negara anggota Liga Arab atau *Arab League* yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada tanggal 21 Januari 2016 yang berbunyi “tidak ada obat mujarab untuk menyelesaikan konflik berabad-abad di Timur Tengah. Pertengkaran yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak dapat dituntaskan begitu saja. Kunci penyelesaiannya

adalah dengan menjembatani perbedaan dengan peningkatan dialog dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing Negara di kawasan Timur Tengah. Untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, China berinisiatif untuk mendorong peningkatan komunikasi melalui kegiatan saling kunjung antara pejabat tingkat tinggi China dengan petinggi negara-negara Arab, memberdayakan mekanisme kerja sama dan konsultasi antar pemerintah, bekerjasama di forum Internasional, dan menegaskan kembalimengenai “kebijakan satu China”. (detik.com, 2018)

Maka dari itu pemerintahan China mengupayakan untuk mendorong kerjasama perdagangan dan investasi melalui konsep yang di cetuskan oleh Presiden Xi Jin Ping yang disebut dengan *One Belt One Road*. Kebijakan luar negeri yang di terapkan oleh China ini bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Kebijakan luar negeri ini melalui proses pertimbangan yang panjang dan sudah berjalan cukup lama dan konsisten. Disebutkan dalam “Kertas Kebijakan terhadap negara Arab” bahwa kebijakan yang ditempuh oleh China didasarkan pada pertimbangan historis yang cukup panjang dan tidak bersifat konfrontatif dengan Barat serta tetap menjaga hubungan baik antara negara yang berseteru. Kebijakan ini memperoleh momentum yang sangat tepat mengingat melemahnya pengaruh Amerika Serikat untuk semakin meningkatkan pengaruh politik dan keuntungan ekonomi di Timur Tengah, dan berpotensi menggeser dominasi Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri ini dinilai cukup berhasil dalam membangun hubungan yang kuat dengan Israel dan negara-negara Arab lainnya. Hubungan yang terjalin antara China dengan Israel sebenarnya telah terjalin semenjak Israel masih menjadi salah satu sumber krisis stabilitas di kawasan Timur Tengah dalam konfliknya dengan Palestina dan dunia islam. Untuk mempererat hubungan antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah pemerintah China siap mengucurkan dana senilai \$ 23 miliar atau setara dengan tiga ratus tiga puluh triliun rupiah. Beijing menjajaki kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas dengan setiap negara-negara anggota Liga Arab yang beranggotak 22 negara.

Hal demikian dijelaskan oleh Presiden Xi Jin Ping guna menjaga kestabilan hubungan China di tatanan global. China dengan negara-negara Liga Arab sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral untuk membentuk kemitraan strategis, kerjasama komprehensif, serta pembangunan bersama yang berorientasi pada masa depan. Sebagai wujud komitmen China dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara anggota Liga Arab, China telah menyiapkan

dana pinjaman sebesar \$ 20 miliar untuk digunakan sebagai proyek infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah Timur Tengah. Selain dana pinjaman tersebut China juga telah menyiapkan dana hibah sebagai bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang dirundung konflik seperti Suriah, Yaman, Yordania, dan Lebanon. (detik.com, 2018)

Didalam pertemuan 22 negara Arab di Beijing bulan lalu, Presiden Xi Jin Ping menjanjikan pinjaman miliaran dollar untuk membantu mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara kawasan ini. Pada KTT Arab ini, China berhasil meningkatkan hubungan mereka dengan kawasan Timur Tengah dan menjadikannya sebagai “kemitraan strategis”. Hal tersebut menandakan peningkatan status perannya di Timur Tengah dalam strategi global Xi Jin Ping. Dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap kawasan Timur Tengah, China telah melihat negara-negara lain sebagai contoh dalam penerapan kebijakan luar negerinya, sebagai contoh Amerika Serikat, dimana negara itu berperan sebagai polisi dunia untuk menciptakan ketenangan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Namun faktanya China tidak dapat mengimplementasikan kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Timur Tengah dengan cara demikian. Prioritas Kebijakan luar negeri yang diterapkan China lebih berfokus pada bidang ekonomi.

Secara efektif, China meluncurkan sebuah program mini *Marshal Plan* untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Pesan utama yang disampaikan didalam Forum Kerjasama China-Arab adalah bahwa China melihat pembangunan ekonomi merupakan sebuah kunci bagi penyelesaian banyaknya masalah keamanan dan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah tersebut. Dan China dalam hal ini berusaha untuk menjadi model dunia dengan menggabungkan antara pembangunan ekonomi yang sukses dengan rezim-otoriter.

China dapat memperoleh keuntungan dari wilayah ini terutama dari segi ekonomi melalui industri petrokimia (termasuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas), investasi, dan pembangunan infrastruktur. Timur Tengah juga memberikan pasar kepada China untuk produk-produk manufaktur dan akses untuk jalur komunikasi vital laut (SLOC). Bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, keunggulan ekonomi komparatif China dapat berdampak di berbagai bidang seperti FDI, infrastruktur, tenaga nuklir, dan teknologi energy terbarukan. Selain itu juga produsen minyak di kawasan Timur Tengah juga tertarik dengan pasar China. Memang dibandingkan dengan China yang memiliki sedikit relasi dengan negara-negara di kawasan Timur

tengah, Amerika Serikat lebih mendominasi hubungan kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah kecuali Iran.

C. Problematika yang dihadapi China dalam mewujudkan visi OBOR.

China dalam pengimplementasian OBOR terhadap negara-negara tetangga terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah menemui beberapa tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya yakni mencakup tantangan *regional security*, keamanan tradisional, seperti persaingan kekuasaan yang besar, perselisihan wilayah dan pulau, dan kekacauan politik di wilayah tersebut, serta ancaman non-tradisional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan terorganisir transnasional. Dalam hal ini sangat penting bagi China untuk memfokuskan perhatian terhadap tiga masalah yaitu, pasokan barang keamanan publik, kepentingan Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Timur Tengah, serta poros Pakistan.

Status quo dari kerjasama keamanan regional OBOR.

Pada awal 2012, gagasan untuk "mempromosikan perbaikan menyeluruh untuk ekonomi terbuka China" diajukan pada Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok (CPC). Pada kongres itu, panggilan diajukan untuk mengoordinasikan kerja sama bilateral, multilateral, regional dan sub-regional, dan mempromosikan interkoneksi dengan negara-negara tetangga.

Pada 2013, keputusan Komite Sentral CPC (CPCCC) tentang "Beberapa Masalah Besar Mengenai Pendalaman Reformasi", mengusulkan agar Tiongkok harus mempercepat pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara tetangga dan wilayah, dan bekerja keras untuk membangun *Economic Belt Road* dan *Maritime Silk Road*, sehingga membentuk pola baru pembukaan ekonomi serba. Pada 2015, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat CPC mengusulkan untuk "melakukan pekerjaan yang baik dalam pembangunan dan implementasi inisiatif OBOR".

OBOR melibatkan tiga benua termasuk Asia, Eropa dan Afrika. Di wilayah yang sangat luas ini, OBOR tidak hanya bergantung pada kerjasama ekonomi regional saja, namun juga menghadapi beberapa resiko yang sangat tinggi terutama terkait dengan perihal keamanan. Dalam skripsi ini saya membagi resiko keamanan tersebut menjadi dua kategori yakni keamanan tradisional dan non-tradisional. (Haiquan, 2017, p. 130)

1. Problematika keamanan tradisional.

Salah satu problem keamanan tradisional ini yakni permainan geopolitik yang sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan-kekuatan besar dunia di wilayah OBOR telah mengedepankan inisiatif regional mereka sendiri, dan saling berupaya meningkatkan pengaruh regional mereka. Berdasarkan "*The New Silk Road: Transport and Trade in Greater Central Asia*", diedit oleh sarjana Frederick Starr pada 2007, Sekretaris Negara Hillary Clinton, pada Juli 2011 di Chennai, India, mengusulkan gagasan "Asia Tengah Raya" dan konsep "*The New Silk Road*". Clinton (2011) mengadvokasi pembentukan hubungan antara Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Barat, dan jaringan transportasi dan pembangunan ekonomi. (Haiquan, 2017, p. 135)

Dia lebih lanjut menggambarkan program "Jalan Sutra baru" kepada masyarakat internasional pada pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September. Program ini mengusulkan bahwa negara-negara tetangga Afghanistan harus melakukan investasi untuk mempertahankan posisi terdepan Amerika Serikat dalam pengembangan pedalaman Eurasia.

Pengaruh Tiongkok telah melemah di wilayah tersebut, yang telah mempengaruhi kerja sama ekonomi antara negara-negara Asia Tengah dan Cina, sehingga mengarah pada pengurangan kohesi SCO. Amerika Serikat juga terus mempromosikan inisiatif "rebalancing Asia-Pasifik" dengan: secara aktif menciptakan konsep Indo-Pasifik memperluas perbatasan Asia-Pasifik ke anak benua India terus memperkuat kekuatan militer Asia-Pasifik menggunakan sengketa teritorial di sekitar wilayah maritim China untuk mendukung sekutu-sekutunya dengan penuh semangat dalam hal itu dan sengketa terkait dan akhirnya dengan menerapkan inisiatif lepas pantai menyeimbangkan China dengan tetangganya. (Haiquan, 2017, p. 131)

Pada tahun 2009, UE mengusulkan "Rencana Jalur Sutera Baru" untuk memperkuat hubungan dengan Asia Tengah dan negara-negara tetangga dalam bidang energi, perdagangan, personel dan informasi, melalui pembangunan "Nabucca Natural Gas Pipeline", UE telah secara aktif berinvestasi untuk memastikan keamanan pasokan energinya sendiri sekaligus meningkatkan pengaruhnya di Asia Tengah. Selain itu, UE prihatin dengan memburuknya perselisihan regional dan menuntut agar semua pihak menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog dan kerja sama dalam kerangka kerja multilateral.

Keterlibatan UE, di satu sisi, kondusif untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dan Rusia di Asia Tengah. Di sisi lain, situasi di Asia Tengah menjadi lebih rumit dan karenanya

tidak kondusif bagi kerja sama regional yang dipromosikan oleh “Jalur Ekonomi Jalur Sutera” Tiongkok.

Pada tahun 2002, Rusia, India dan Iran bersama-sama mensponsori “North-South Corridor Project” mengusulkan bahwa koridor transportasi internasional Eropa dijalankan melalui India, Iran, Kaukasus dan Rusia, untuk mempertahankan pengaruh regional tradisional mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah mengusulkan inisiatif integrasi Asia Tengah, yaitu visi “Uni Eurasia”, yang bertujuan mempercepat proses integrasi ekonomi CIS.

Setelah Perang Dingin, Rusia selalu menganggap Asia Tengah sebagai wilayah pengaruhnya yang tradisional. Meskipun mendapat dukungan dari program “*Economic Belt Road*” selama pertemuan puncak Tiongkok-Rusia pada Mei 2014, selama Konferensi tentang Tindakan Interaksi dan Pembangunan Percaya Diri di Asia (CICA), Rusia curiga terhadap Tiongkok, yang kemudian mempengaruhi semua kerja sama antara Cina dan negara-negara Asia Tengah.

India, Iran dan Afghanistan mempromosikan proyek pembangunan “*Southern Silk Road*” bersama-sama, mencoba untuk menghubungkan “*Maritime Silk Road*” dan “*Land Silk Road*” bersama-sama. India, berdasarkan keunggulan geografisnya, berupaya mendominasi Samudra Hindia dan telah menjaga agar tidak ada kekuatan eksternal di Samudra Hindia. Secara khusus, apa yang disebut “*string pearl initiative*” dipandang oleh India sebagai pengepungan strategis.

Raja Mohan meragukan apakah India akan mengizinkan Jalur Sutera Maritim China diimplementasikan melalui Samudra Hindia karena faktor geopolitik dan keamanan terlalu kuat. Ini memiliki dampak negatif pada kerja sama China dengan negara-negara di Asia Selatan. Secara khusus, inisiatif kelautan India yang kuat terikat untuk mempengaruhi keamanan saluran energi China. Selain itu, India secara aktif mengejar inisiatif “*Eastward*” terlibat dalam masalah Laut Cina Selatan dalam persaingan ekonomi, politik dan militer dengan Cina, dan meningkatkan pengaruh radiasi urusan Asia-Pasifik, sehingga meningkatkan tekanan strategis Tiongkok ke arah Asia Tenggara. (Haiquan, 2017, p. 136)

A. Sengketa wilayah dan pulau.

Dilihat dari segi historisnya, ada berbagai sengketa wilayah dan pulau di wilayah OBOR dan hasil penyelesaian sengketa secara langsung memengaruhi jaminan keamanan pelaksanaan inisiatif. Perselisihan saat ini meliputi wilayah laut dan darat. Di wilayah laut, perselisihan meliputi “sengketa Laut China Selatan” antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, Rig pengeboran

"China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 981" menyebabkan apa yang disebut sengketa "*Paracel islands sovereignty*" Tiongkok-Vietnam pada Mei 2014. China, Filipina, dan Vietnam mengintensifkan sengketa "kedaulatan pulau-pulau Spratly", ada perselisihan tentang pulau Diaoyu dan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Timur antara Cina dan Jepang. (Haiquan, 2017, p. 137)

Inti dari sengketa maritim ini adalah perselisihan antara para pemimpin tatanan regional dan para pengikutnya, dan kebangkitan Cina. Dalam jangka pendek, Cina tidak dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh sebagian besar pihak yang berselisih untuk meredakan situasi tegang. Ini tidak akan membantu memperdalam kerja sama menyeluruh antara Cina dan ASEAN, sehingga memengaruhi hak keseluruhan Cina untuk merumuskan putaran baru peraturan perdagangan.

Di darat, setelah Perang Dunia II sengketa Kashmir antara India dan Pakistan, sengketa perbatasan Tiongkok-India dan sengketa wilayah Palestina-Israel masih belum terselesaikan. Setelah Perang Dingin, dengan disintegrasi Uni Soviet, di daerah "Satu Sabuk" sejumlah negara berdaulat telah muncul. Demarkasi perbatasan antara negara-negara ini belum selesai. Kantung Tajikistan, Vorukh, terletak di wilayah Kyrgyzstan.

Perbatasan antara kedua negara adalah 911 kilometer panjangnya, dengan hanya 567 kilometer yang digambarkan dan lebih dari 70 wilayah yang disengketakan. Pada 11 Januari 2014, kedua negara memasuki konflik bersenjata di daerah perbatasan. Antara Tajikistan dan Uzbekistan, dua puluh persen perbatasan tidak ditentukan. Antara Kirgistan dan Uzbekistan, perbatasan Fergana juga tidak jelas. Sementara Uzbekistan memiliki kantong Sokh dan Shakhimardan di Kirgistan. Daerah kantong ini telah bentrok dengan penduduk setempat. Selain itu, ketiga negara tidak berkompromi dalam pembagian sumber daya air. Di wilayah perbatasan ini, perselisihan kantong dan perselisihan air telah menjadi faktor penting dalam situasi yang memburuk di wilayah tersebut.

Perselisihan di Asia Tengah secara langsung berdampak negatif pada masa depan SCO tentang politik saling percaya, keamanan dan kerja sama ekonomi, dan tidak kondusif untuk menjaga stabilitas wilayah barat China. (Haiquan, 2017, p. 137)

B. Politik regional di masing-masing negara.

Sebagian besar negara di wilayah OBOR adalah negara berkembang yang dipengaruhi oleh faktor rumit seperti kontradiksi kelas sosial dan masalah etnis dan agama. Negara-negara ini umumnya mempraktikkan politik partai. Namun, karena perjuangan untuk pemerintah, situasi politik di beberapa negara rentan dan tidak pasti. Integrasi kepentingan nasional dan pengakuan rasa memiliki bersama lebih sulit, yang mengarah pada kurangnya perumusan kebijakan internal dan luar negeri yang penting. Sebagai contoh, perkembangan politik di Kyrgyzstan dan Tajikistan telah mengalami pasang surut.

Secara khusus, kontradiksi Kirgistan-Selatan di Kirgistan masih tajam dan protes musiman menjadi normal. Kirgistan mengumumkan bahwa mereka akan secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan "*One Belt*", sementara pada Desember 2013 mengumumkan penarikannya dari pembangunan Kereta Api China Kyrgyzstan-Uzbekistan, yang meningkatkan kesulitan koordinasi proyek. Selain itu, Somalia di sepanjang Samudra Hindia, Yaman, Iran, dan Pakistan semakin menjadi negara atau wilayah yang berpotensi berbahaya.

Karena inisiatif OBOR untuk mempromosikan masa depan Tiongkok terikat untuk meningkatkan investasi di wilayah ini, meningkatkan impor, sering melakukan pertukaran personel, negara-negara ini akan meningkatkan biaya ekonomi investasi dan mengurangi efisiensi kerja sama, dan dengan demikian mempengaruhi kepentingan China di luar negeri.

2. Problematika keamanan non-tradisional

A. Ancaman terorisme

Aktivitas destruktif dari "three forces" (pasukan teroris, ekstremis agama, dan pasukan separatis nasional), yang merupakan inti dari terorisme, merupakan faktor penting yang mengancam pelaksanaan inisiatif OBOR, yang semakin menjadi ancaman keamanan non-tradisional terbesar di wilayah tersebut. Terlepas dari perbedaan antara tujuan politik organisasi ekstremis, bentuk organisasi, komposisi personel dan kegiatan

Ciri umum mereka adalah bahwa mereka menentang rezim sekuler dan menganjurkan pembentukan negara Islam dengan kesatuan politik dan agama. Sebagai hasil dari perubahan dalam situasi anti-terorisme internasional, dan perubahan dalam situasi keamanan regional,

organisasi-organisasi ekstremis di wilayah tersebut ditandai oleh lintas personel, ideologi yang membimbing, desentralisasi, fragmentasi, dan hubungan lain dengan teroris internasional organisasi. (Haiquan, 2017, pp. 138-139)

Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 2014 kemungkinan akan menyebabkan eskalasi konflik di wilayah itu, yang mengakibatkan ekstremisme Islam dan terorisme yang mungkin “meluap”, mempengaruhi stabilitas regional. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir pasukan teroris Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM), yang terkait satu sama lain di dalam dan luar negeri terhadap sasaran Tiongkok, dari waktu ke waktu melakukan serangan yang merupakan ancaman terhadap keselamatan pribadi dan properti orang-orang Tiongkok.

B. Keamanan jalur laut.

Mempertahankan akses yang aman merupakan pertimbangan penting dalam implementasi inisiatif OBOR, yang akan memastikan laut saluran tetap terbuka daripada terputus. Sembilan puluh persen dari perdagangan komersial global dan enam puluh lima persen dari total volume minyak dunia pergi melalui pengiriman laut, dengan Samudra Hindia menyediakan setengahnya pengiriman kontainer dunia dan tujuh puluh persen dari transportasi produk minyak bumi dari Timur Tengah ke Pasifik. Rute-rute Samudra India secara strategis penting untuk perdagangan global seperti Selat Mendoza, Selat Hormuz dan Selat Malaka, dengan empat puluh persen perdagangan dunia mengalir melalui Selat Malaka dan empat puluh persen perdagangan minyak mentah mengalir melalui Hormuz Selat.

Sebagian besar perdagangan minyak lautan Cina terkonsentrasi di Selat Malaka, Samudra Hindia ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Jika minyak adalah darah industri, maka saluran yang menghubungkan Samudra Hindia dari Timur Tengah, dan melalui saluran Selat Malaka, telah benar-benar menjadi jalur pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga jalan yang aman dari Selat Malaka, Selat Hormuz dan Selat Mande di “*One Road*”. Mengenai Selat Malaka, tantangan utamanya berasal dari Amerika Serikat, yang juga mencoba mengendalikan Selat. (Haiquan, 2017, pp. 139-140)

Selat Hormuz dilanda oleh situasi keamanan yang memburuk di wilayah tersebut, sementara Selat Mande ditantang terutama dari ancaman bajak laut. Menurut Laporan Pembajakan Global dari Biro Maritim Internasional (IMB), pada tahun 2013 pembajakan di lepas pantai Somalia menurun secara signifikan; telah turun dari 237 acara di 2011 menjadi 15 di 2013. Namun, ancaman serangan masih ada, terutama di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden

C. Tekanan integrasi ekonomi regional.

Tujuan dari inisiatif OBOR Cina adalah untuk membangun ekonomi yang lebih dekat dan hubungan dagang dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah dan Asia Eropa, untuk lebih mengembangkan kerja sama timbal balik dan ruang yang lebih luas untuk pembangunan, untuk mempromosikan pembangunan daerah dan kemakmuran melalui teknologi dan investasi, dan untuk mempromosikan ekonomi Tiongkok meningkatkan dan menyeimbangkan kembali.

Amerika Serikat telah mengusulkan untuk membangun Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TTP) untuk menghambat proses integrasi regional di Asia Timur dan untuk membagi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang dipimpin ASEAN, yang secara bertahap telah terbentuk di Asia-Pasifik wilayah. Pada saat yang sama, Eropa dan Amerika Serikat bekerja keras untuk membangun perjanjian Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP), mengadvokasi aturan ekonomi dan perdagangan internasional yang lebih liberal, dan menghambat proses kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Asia dan Eropa. TTP dan TTIP dibangun di atas kepentingan jaringan Barat sendiri, sehingga menghalangi tujuan strategis OBOR. (Haiquan, 2017, p. 140)

D. Kejahatan transnasional yang terorganisir.

Cina telah mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara dalam inisiatif OBOR. Pada saat yang sama, kejahatan terorganisir transnasional, salah satu dari "tiga bencana besar dunia" menurut Majelis Umum PBB, telah menjadi semakin merajalela dan telah secara serius mempengaruhi perkembangan ekonomi dan stabilitas sosial semua negara yang terlibat. Jenis kejahatan transnasional terorganisir saat ini meliputi, penyelundupan narkoba, khususnya penyebaran produksi opium di Afghanistan ke dunia. (Haiquan, 2017, p. 140)

"*Drugs Economic*" dan ekstrimis agama di Asia Tengah, berdampak pada keamanan barat China, kejahatan imigran ilegal, ekspor tenaga kerja Cina dan pekerjaan di luar negeri pada saat yang sama, mengakibatkan berbagai kejahatan dengan layanan tenaga kerja asing, kejahatan ekonomi transnasional, seperti pencucian uang dan penipuan telekomunikasi.

C. Sejarah hubungan China dengan kawasan Timur Tengah dan kepentingan China terhadap kawasan Timur Tengah.

1. Hubungan antara China dengan Timur Tengah era kuno dan hingga sekarang.

Hubungan China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah sudah terjalin sejak zaman dahulu kala. Hubungan mereka telah terjalin sejak era Dinasti Han, 2000 tahun yang lalu. Semenjak didirikan pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok sangat antusias dalam mengembangkan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara di Timur Tengah. Akhir dari perang dingin dan juga perang Teluk ke dua secara radikal membuka peluang baru untuk perubahan dalam hubungan internasional dan juga mengubah kekuatan politik di kawasan Timur Tengah. Dalam sejarah jalur sutera, hubungan dagang antara China dengan negara-negara Timur Tengah salah satunya dengan Arab juga terjalin cukup erat. Hubungan yang terjalin memunculkan akulturasi budaya yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Saat ini di era President Xi Jin Ping, genderang akselerasi kerjasama antara China dengan Timur Tengah semakin kencang ditabuh, seiring dengan kemajuan China dalam berbagai sector kehidupan. Negara-negara di Kawasan Timur Tengah terlihat semakin mengukuhkan hubungan kerjasama dengan China delapan tahun terakhir ini. Pada awal Juli, dalam kesempatan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri didalam Forum Kerjasama Dunia China dan Arab, yang berlangsung di Beijing dan di hadiri oleh 18 Menteri Luar Negeri dari kawasan Timur Tengah menyepakati hubungan kerjasama dalam tiga hal, yakni di sektor energi, impor barang-barang murah produk China, dan juga dari sektor teknologi. Timur Tengah dalam hal ini juga mulai melirik China dalam pengembangan energi nuklir, energi terbarukan, dan juga siber. (detik.com, 2018)

President Xi Jin Ping telah melacak hubungan kerjasama antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah sejak diadakannya Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Bandung. Dalam konferensi tersebut China mendukung penuh negara-negara Arab dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Setelah itu negara-negara Arab pun turut mendukung penuh atas keanggotaan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pula negara-negara Arab menjadi yang paling pertama dalam mengulurkan bantuan kepada China saat China dirundung musibah gempa bumi beberapa tahun yang lalu.

Dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin antara China dengan Timur Tengah secara umum berjalan secara inklusif, dialogis, bahkan bias dikatakan tanpa kecurigaan dan konflik. Bahkan hampir sama sekali tidak ditemukan konfrontasi antara negara-negara Arab dengan China, padahal kita ketahui bahwa mereka memiliki perbedaan yang mencolok dari segi budaya, ideology, agama, tradisi, dan sistem sosial. Dengan dilatar belakangi hubungan yang harmonis diantara China dengan negara-negara kawasan Timur Tengah Presiden Xi Jin Ping menganggap bahwa proyek pembangunan jalur sutera yang sedang dirancangnya tidak akan menemui kendala yang berat.

China juga memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama dalam sector energi minyak bumi, dan gas alam. Bahkan Arab Saudi ingin menjual saham minyak nya ke China dalam bentuk mata uang Yuan. Hal tersebut menandakan adanya era baru dalam hubungan kerjasama antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Embargo yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran pun tidak mempengaruhi China untuk tetap membeli minyak bumi dan gas alam dari Iran dengan jumlah yang cukup besar pula.

Hal yang membuat negara-negara di kawasan Timur Tengah merasa aman dan nyaman untuk menjalin hubungan kerjasama dengan China yakni mereka beranggapan bahwa China tidak seperti negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara dari Eropa yang berniat mencaplok sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah dan ikut campur dalam permasalahan internal yang terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah. Memang bentuk dari politik luar negeri China yang dijalankan oleh President Xi Jin Ping ini berfokus pada kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dan saling menghormati atau yang disebut dengan '*mutual interest and mutual respect*'. (detik.com, 2018)

Negara-negara di kawasan Timur Tengah melihat China sebagai partner tepat dalam pengembangan industri teknologi. Pasalnya China memang merupakan negara produsen teknologi industri dengan tingkat kemajuan yang sangat pesat yang diperkirakan akan mengalahkan negara-negara produsen industri teknologi besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Bagaimanapun China akan menjadi aktor penting dalam perkembangan sektor industri teknologi di dunia. Hubungan mesra yang terjalin antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah juga terlihat dari kuatnya akar komunisme di kawasan Timur Tengah. Eksistensi partai-partai komunis dari dulu hingga saat ini masih cukup kuat.

Di negara-negara kawasan Timur Tengah kita akan mendapati partai-partai komunis dan partai-partai sosialis bertengger kuat di sebagian negara-negara besar Arab. Sebagai contoh partai komunis yang ada di Suriah yang sejak akhir dekade tahun 1960-an secara eksplisit memiliki hubungan dengan China. Begitu juga di negara-negara lain seperti Iran, Turki, Tunisia, Mesir, Maroko, dan Aljazair yang memiliki paham komunisme yang masih tetap eksis hingga saat ini.

Kelonggaran paham komunisme dan sosialisme ini terbukti dengan adanya penyebaran melalui media dan buku-buku. Bahkan hal demikian menumbuhkan dialektika antara keislaman dengan pemikiran-pemikiran kiri. Munculnya pemikiran “Islam kiri” yang di luncurkan oleh Hassan Hanafi menandakan bahwa adanya upaya sintesis antara keislaman dengan paham kiri.

Dari hal hal tersebut, hampir bahkan dapat dikatakan tidak ditemukannya sentimen antara hubungan China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Berbeda dengan fakta yang terjadi di negara kita yang sangat sensitive dengan segala hal yang identic dengan China, terutama komunisme. Negara-negara di kawasan Timur Tengah relatif lebih bias menerima China dikarenakan faktor sejarah yang cukup panjang dan hubungan yang terjalin dengan baik dalam sektor apapun dan terus membaik hingga saat ini.

Walaupun memang terdapat sekelompok kecil yang menghembuskan sentimen anti-China yang terdapat di negara kawasan Timur-Tengah ini namun tidak ditemukan pihak-pihak yang menggunakan sentimen anti-China sebagai instrumen politik di Timur Tengah. Dilihat pula bahwa hubungan mesra yang terjalin kurang lebih delapan tahun terakhir ini antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah membuktikan bahwa tidak ada persoalan atau permasalahan yang serius antara dunia islam dan China bahkan antara islam dengan komunisme. Justru perbedaan tersebut membuat hubungan diantara keduanya semakin erat dalam sektor apapun. (detik.com, 2018)

2. Kepentingan China di kawasan Timur Tengah

Terlihat dari sejarah hubungan antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang begitu erat dan harmonis China memiliki peluang yang cukup terbuka untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya. Hubungan yang terjalin sejak lama dan secara harmonis bertahan hingga saat ini bukan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh China. Hal ini

sejalan dengan konsep atau teori yang saya gunakan yaitu konsep “kepentingan nasional”. Faktanya bahwa kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang mempunyai daya tarik cukup tinggi dikarenakan berbagai faktor baik dari segi geografis maupun segi potensinya yang membuat negara-negara besar sangat ingin bermain peran didalam percaturan politik di kawasan ini dan tentunya mereka berusaha untuk mendapatkan kepentingan nasional mereka masing-masing. Kawasan Timur Tengah memang secara nyata memiliki kekayaan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam dan menyediakan separuh dari import minyak mentah China. (Lin, 2017)

Kawasan Timur Tengah juga merupakan sebuah akses untuk pasar Eropa dan Afrika yang mana Uni Eropa merupakan pasar ekspor terbesar China, dan kawasan ini merupakan front terdepan dari *counter-terrorism*, terutama untuk China dan negara-negara Asia lainnya yang terus bergantung pada kawasan Timur Tengah dalam hal energi impor. Pada dasarnya, China membutuhkan keamanan dan stabilitas regional jalur pasokannya.

China saat ini menjadi importir minyak mentah teratas ditingkat dunia, dengan GCC, Iraq, dan Iran menyumbang 60 persen dari minyak impor China. Saudi Arabia, Uni Emirate Arab, dan Iran merupakan tiga mitra dagang China yang paling utama. Perdagangan bilateral yang terjalin antara China dengan Arab Saudi lebih dari \$ 70 miliar, dengan Uni Emirate Arab sebesar \$ 46,3 miliar, dan Iran sebesar \$ 31,6 miliar. Perdagangan China dengan GCC atau *Gulf Country Council* mencapai \$ 114 miliar pada tahun 2016. (Lin, p. 5)

Diagram impor minyak mentah China

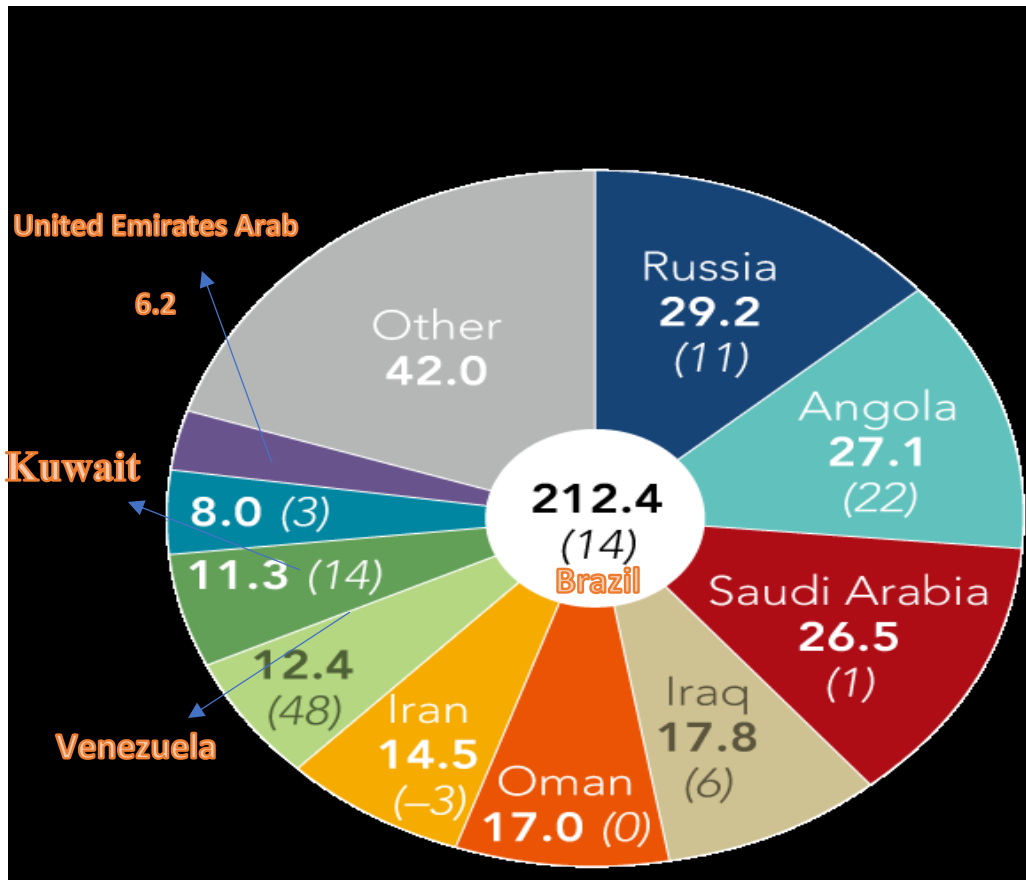


Diagram B.2.1. Diagram impor minyak mentah China.

China menghadapi tantangan dari tingginya tingkat persaingan Arab Saudi dengan Iran yang keduanya merupakan pemasok minyak mentah utama dan juga secara strategis mengapit Teluk Persia atau Arab, dan Selat Hormuz, sehingga ketidakstabilan yang terjadi di kawasan tersebut akan berimbas pada misi OBOR yang akan dijalankan melalui Timur Tengah. Para petinggi China sangat khawatir dengan gangguan pasokan energy yang nantinya diperkirakan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonominya dan juga mengganggu legitimasi Partai Komunis China (PKC).

Kelancaran akses pasokan minyak ke China merupakan sebuah kunci bagi China. China berusaha untuk membangun sebuah *firewall* antara Iran dengan Arab Saudi, dan faktanya bahwa China merupakan pasar permintaan yang relatif stabil untuk kontrak pasokan jangka panjang

mereka. Ini menandakan bahwa Beijing memiliki beberapa pengaruh dalam upaya untuk membantu mengurangi ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran. (Lin, p. 5)



Gambar B.2.1. Peta Selat Hormuz.

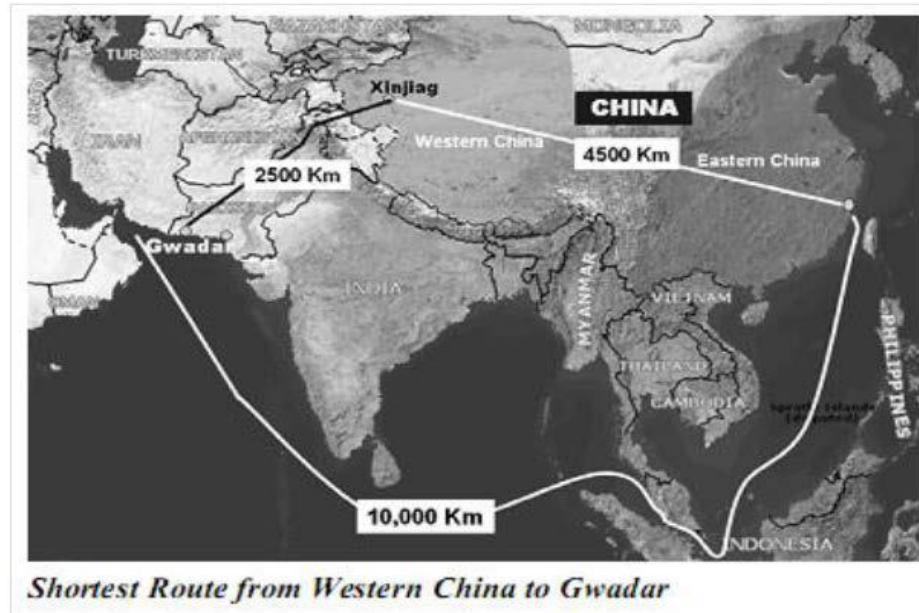
China meningkatkan profil regionalnya pada awal tahun lalu ketika Presiden Xi Jin Ping berkunjung ke Arab Saudi, Mesir, dan Iran dan merilis Makalah Kebijakan pertamanya untuk mengisyaratkan niatnya untuk meningkatkan keterlibatan China dalam kawasan Timur Tengah. Makalah tersebut menguraikan strategi “1+2+3”, “1” yakni kerangka kerjasama dengan energi sebagai inti. “2” yakni konstruksi infrastruktur, dan perdagangan atau keuangan sebagai dua sayapnya, “3” yakni kerjasama lebih lanjut dalam tiga bidang yakni energi nuklir berteknologi tinggi, satelit ruang angkasa, dan energy terbarukan. (Lin, p. 6)

China juga berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara Riyadh dengan Teheran. Pada bulan Maret, China menandatangani kesepakatan senilai \$ 65 miliar dengan Riyadh dan bermaksud untuk mengkoordinasikan proyek-proyek OBOR dengan Saudi Vision tahun 2030.

Sementara pada bulan Juli China mendukung masuknya Iran ke Organisasi Kerjasama Shanghai atau *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) dan baru-baru ini juga memperpanjang batas kredit \$ 10 miliar yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Bagi China, Iran merupakan simpul penting dalam proyek OBOR berdasarkan dari letak geografisnya yang menghubungkan antara Asia Tengah dengan Asia Selatan dan Barat, sementara Arab Saudi adalah pemimpin dari GCC dan juga merupakan pemasok minyak utama.

Pakistan juga menjadi salah satu negara yang berkaitan dengan kawasan Teluk dan merupakan lokasi unggulan dari proyek *One Belt One Road*. Koridor Ekonomi China Pakistan atau *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) diluncurkan pada tahun 2015 dan saat ini sudah mencapai nilai kurang lebih \$ 62 miliar. Proyek ini terdiri dari investasi ekstensif dalam transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur energy Pakistan dan bahkan berencana untuk memperpanjang dua ribu lima ratus kilometer atau sekitar seribu lima ratus lima puluh tiga mil untuk menghubungkan pelabuhan Gwadar di Barat Daya dengan Selat Hormuz-ke Kashgar di Provinsi Xinjiang Barat Laut China.

Kondisi saat ini, minyak Teluk harus menempuh jarak kurang lebih lima belas ribu kilometer untuk mencapai Xinjiang, sepuluh ribu kilometer ditempuh melalui jalur laut, kemudian empat ribu lima ratus kilometer melintasi hampir seluruh dari daratan China. Jadi CPEC berencana untuk memperpendek jalur ini sekitar dua belas ribu kilometer. (Lin, p. 7) Kepentingan-kepentingan China memfokuskan pada peningkatan kerjasama ekonomi, pengembangan infrastruktur secara agresif, serta peningkatan investasi dengan negara-negara OBOR khususnya negara-negara di Kawasan Timur Tengah.



Gambar B.2.2. China-Pakistan Economic Corridor's map.

Dengan kontrol operasional pelabuhan selama empat puluh tahun, setelah proyek ini selesai China akan memiliki kemudahan akses langsung ke Samudera Hindia dan pasokan minyak dari Teluk yang melewati Selat Malaka, dimana saat ini hampir sekitar delapan puluh persen pasokan impor minyak China dari Teluk melewati Selat ini. Namun hal demikian membuat China berada dalam posisi dilema yang dikenal dengan sebutan dilema Malaka. China berfikir bahwa angkatan laut Amerika Serikat dapat memotong pasokan minyak China melalui Selat Malaka dalam potensi konfrontasi China dengan Amerika Serikat. Koridor ekonomi China-Pakistan inilah salah satu cara untuk melindungi China dari keadaan dilema ini. (Lin, p. 8)

Dalam hal ini China memandang Kawasan Timur Tengah sebagai kawan yang sangat penting bagi berjalannya proyek *One Belt One Road* (OBOR). Presiden Xi Jin Ping mengungkapkan didalam Forum Kerjasama China-Arab ke-VI yang diselenggarakan pada Juni 2014, bahwa China dengan negara-negara Arab telah menikmati hubungan persahabatan dan saling pengertian sejak Jalur Sutera yang asli, dan merupakan mitra alami untuk bersama-sama membangun jalur *one belt one road*.

China ingin mempercepat kerjasama yang dijalin dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan menargetkan 10 tahun kedepan, China berupaya untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dari \$240 miliar menjadi

\$ 600 miliar pada tahun 2013. China juga berencana untuk meningkatkan stok investasi non-finansial di Pasar Arab dari \$ 10 miliar menjadi \$ 60 miliar di tahun 2013, juga mempercepat negosiasi untuk pembentukan daerah perdagangan bebas antara China dengan GCC, serta mendorong partisipasi negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Dalam hal ini Presiden Xi Jin Ping juga ingin mempromosikan interaksi *people-to-people* dan juga pertukaran budaya. Presiden Xi Jin Ping mengusulkan bahwa pada tahun 2020, China akan memberikan pelatihan profesional kepada enam ribu orang dari negara-negara Arab guna mengoperasikan proyek OBOR.

Pemerintah China juga bermaksud untuk mengatur kunjungan bersama dan pertukaran sepuluh ribu seniman China dan Arab, dan mendukung kerjasama antara dua ratus lembaga kebudayaan China dan Arab. Perkembangan hubungan kerjasama antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah memang tidak tumbuh dengan cepat. Di tahun 1978 merupakan sebuah titik balik dalam sejarah modern China.

Sejak itu China membuka diri kepada dunia dengan semangat praktisme dan terbuka, menghilangkan stagnasi pada ideologi dan mempromosikan perdagangan dan pertukaran ekonomi yang bebas. Namun kondisi di wilayah Timur Tengah sudah mulai terpolitisasi dimana Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berusaha untuk mendominasi percaturan politik di wilayah Timur Tengah.

Dengan kondisi yang sedemikian rumit akan mempersulit gerak China dalam memasukan kepentingannya untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Namun hal tersebut tidak menghalangi China untuk terus masuk dan menjalin hubungan kerjasama untuk dapat mencapai tujuan ekonominya. China terus membangun hubungan diplomatic dengan negara-negara di kawasan itu untuk memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas terbuka. Peluang China untuk melancarkan misi *one belt one road* di kawasan Timur Tengah cukup terbuka lebar setelah China melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. China menjalin hubungan diplomatic dengan Israel pada tanggal 24 Januari 1992. Hal demikian sangat menguntungkan bagi China karena membuka peluang untuk berpartisipasi dan mempengaruhi dalam urusan di Timur Tengah.

Semenjak tahun 1978, simpati dan dukungan China terhadap permasalahan Negara-negara di kawasan Timur Tengah telah menjadi dorongan utama kebijakan luar negeri China terhadap kawasan Timur Tengah. Namun pembuat kebijakan semakin menyadari bahwa pentingnya dalam melakukan promosi perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan seluruh wilayah. Dalam hal ini, Timur Tengah yang menempati posisi sebagai pemasok minyak utama, jelas sangat mempengaruhi perekonomian dunia.

Selain itu, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan GCC, dimana mereka sebagai pemilik dollar minyak, berperan besar terhadap pasar keuangan dunia. Oleh sebab itu maka dinilai sangat penting untuk memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi dengan wilayah Timur Tengah secara bertahap dan menjadi tujuan penting bagi kebijakan luar negeri China. (Nusantara News, 2017)

Namun tidak mudah bagi China untuk memasuki pasar di kawasan Timur Tengah selain dikarenakan China tidak menjalin hubungan diplomatic dengan sebagian negara di kawasan Timur Tengah tersebut juga terdapat monopoli produk yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, Eropa, bahkan Jepang yang mendominasi pasar di kawasan Timur Tengah ini. Hubungan positif yang terjalin antara China dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang terbentuk pada awal tahun 1980-an menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi bilateral sedang bergerak maju menuju tahap baru.

Bahkan pada tahun 1992, China telah menjalin hubungan diplomatic dengan semua negara di kawasan Timur Tengah, dimana China meletakkan dasar politik yang kuat untuk kerjasama membangun ekonomi bersama. Kondisi kemajuan perdamaian antara Israel dengan Arab pun mengendorkan ketegangan regionalnya pada umumnya, dan menempatkan kerjasama ekonomi kedalam agenda regionalnya. China berpendapat bahwa ikut berpartisipasi dalam rekonstruksi ekonomi dan mencari peluang komersial di kawasan Timur Tengah akan membantu pertumbuhan perekonomian kedua belah pihak dan meningkatkan stabilitas social di kawasan tersebut.